

Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik

B. Aly

Guru Besar Universitas Indonesia (tiaraly@hotmail.com)

Abstrak

Communication development in globalization era is getting more and more important and significant since every party and the stakeholders have to work hand in hand in fair and honest way to achieve a better quality of social order. All parties and the stakeholders can optimize their part if they have intellectual vision, make good use of the information networking, and keep a good relation with everyone. Political communication approach demands the political elite and the community leader to care and commit themselves to the betterment of the nation. The main point is the communication development is aiming at improving the life quality of everyone in every level of life.

Key words: *communication development, human resource development, political communication*

1. Pendahuluan

Konstelasi politik Indonesia sejak dicanangkan Reformasi adalah sangat dinamis dan kadangkala perkembangannya tidak dapat diprediksi. Kita telah memasuki era demokrasi yang pilarnya antara lain akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Semua lembaga kenegaraan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya memperlihatkan sikap keterbukaan yang jujur, fair dan jauh dari sikap kemunafikan. Di sisi lain proses demokratisasi telah memberikan peran masyarakat yang lebih aktif, masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan. Ia tidak lagi sebatas obyek tetapi subyek Demokrasi.

Hak-hak masyarakat harus diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menggunakan hak-hak warga negara dalam segala lini termasuk penggunaan hak politiknya. Ketika masyarakat masuk dalam proses demokrasi maka peran dan fungsi Partai Politik menjadi sangat relevan. Karena dalam sistem Kenegaraan yang mengedepankan demokrasi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik menempati posisi yang sangat strategis.

Tolok ukur suatu Negara dikategorikan demokrasi apabila ia antara lain memiliki Partai Politik, Serikat Buruh, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Media dan hadirnya kelompok-kelompok kepentingan Partai Politik berjuang untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan melalui wakil-wakilnya di Parlemen. Repotnya elit politik kita digugat rakyat karena dianggap tidak peka dan kurang peduli dengan nasib rakyat. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa banyak sekali anggota Parlemen yang punya kepedulian

Elit politik kita digugat, ia dianggap kurang responsif, tidak bertanggung jawab atas kemelut politik yang terjadi, ia tidak peka terhadap penderitaan rakyat, asyik-masyuk dengan dirinya sendiri. Perdebatan di tingkat Elit, sebutlah diskusi di lingkungan partai politik, pemerintahan dan parlementaria sering tidak membumi yang dibincangkan.

Agenda reformasi di bidang politik, hukum/HAM, sosial budaya dan aspek strategis lainnya memang dibicarakan, dibahas tetapi suka luput dari realisasi yang masyarakat dambakan. Apa yang dipikirkan di benak elit politik kita kadangkala sulit dipahami oleh masyarakat, mereka merasa komunikasi politik elit kita seperti tidak terjangkau, mengalami distorsi bahkan terdapat kesenjangan. Carut-marut merebak dalam reportase di media massa kita mendramatisasi

masalah, bahkan dianggap meruncing-persoalan.

Apa yang salah dari komunikasi politik elit, sehingga perlu ditata ulang dengan pendekatan moralitas dan etika politik? Etika politik menjadi relevan sebagai rujukan dalam mengembangkan komunikasi politik yang sesuai dengan sistem nilai bangsa.

2. Hakikat Komunikasi Politik

Komunikasi politik sudah seharusnya berlandaskan pada falsafah negara, sistem politik dan memperhitungkan etos dan dinamika bangsa yang hidup di tengah-tengah masyarakat primordial. Upaya elit untuk mempengaruhi masyarakat agar gagasan politik yang memiliki substansi ideologi, orientasi politik dan pemikiran yang diarahkan untuk mempengaruhi masyarakat pada suatu capaian dan prestasi tertentu dengan segala konsekuensi yang patut diperhitungkan, dapatlah disebut sebagai ruang lingkup atau definisi komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari elit politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan dan tanggung gugat (akuntabilitas).

Prof. Dr. David Easton yang menggeluti masalah sistem politik mencermati komunikasi politik sebagai sejumlah atau seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas *social behavior* dengan caranya masing-masing mempengaruhi bahkan hendak menguasai masyarakat dengan gagasan yang mereka miliki. Sehingga aktivitas komunikasi politik mampu mengikat semua komponen bangsa dengan sanksi dan kompensasi yang disepakati

bersama.

Komunikasi Politik menemukan formatnya pada suatu tahapan sistem politik yang relatif sudah mapan. Elit politik dalam menyampaikan gagasan politiknya agar "dituruti" oleh masyarakat tentu harus memperhatikan kondisi-kondisi obyektif, sistem nilai dan dinamika masyarakat dengan cara-cara persuasif, kooperatif dan bermoral. Ukuran tingkat keberhasilan dipergunakan indikator-indikator utama, yaitu: religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Kesembilan indikator utama ini haruslah menjadi acuan Komunikasi Politik Elit kita, baik yang berada di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan para pengambil keputusan strategis seperti di partai politik.

Muatan normatif terdapat dalam etika dan visi bangsa sesungguhnya sudah ada atau pernah hidup ditengah-tengah masyarakat kita. Masalahnya ketika penyelenggara negara dan masyarakat tidak berdaya bereaksi atas sikap-tindak negara yang otoriter, maka reduplah nilai-nilai yang sudah eksis tersebut. Bahkan sistem nilai yang diaksep masyarakat terkesampingkan hanya demi atas nama "harmoni" (semu), stabilitas, kepentingan nasional, uniformitas dan formalitas akomodatif. Kini ada suatu kebutuhan untuk mengaktualisasikan agar sistem nilai tersebut dapat "kembali" membumi, ditaati oleh semua warga negara dan menjadi pemandu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merajut kembali kebersamaan perlu suatu kajian cermat ketika pusat digugat oleh banyak daerah atas sikapnya yang tidak adil, semena-mena dan mengarah pada egosentris Jakarta. Hasrat untuk bersatu (*Le desire d'etre ensemble*, Renan) yang hingga kini

diyakini sebagai perekat persatuan bangsa karena kesamaan bahasa, agama dan budaya bahkan pengalaman kesejarahan, kini sejak masa reformasi mendapat ujian sangat berat, disintegrasi nasional adalah taruhannya.

Otonomi Daerah merupakan jalan keluar bagi keterbelengguan daerah atas cengkaman pusat pada masa lalu. Konflik etnis, antar suku yang pada masa lalu dianggap sudah tidak bermasalah ternyata ia seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu mendapat gesekan, ia meledak membakar dan memusnahkan kebanggaan kolektif.

Krisis kepercayaan yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini menjadikan masyarakat bangsa patah arang dan kehilangan kepercayaan terhadap pengambilan keputusan. Korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi penyakit menular yang laten. Situasi moneter merangkak buruk, rapuhnya sektor perbankan, suku bunga yang naik-turun seperti eskalator rusak menjadikan konsumen kehilangan pegangan.

Kecemburuan sosial tumbuh merebak, kesenjangan ekonomi menjadikan orang menempuh jalan pintas, potong kompas, menghalalkan segala cara (mental menerabas, Koentjaraningrat) terjadi erosi moral hampir di segala strata masyarakat dan kepemimpinan. Manifestasi dari keangkaramurkaan tersaji gamblang dan telanjang dalam bentuk aksi penjarahan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan dengan main bakar dan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan. Kita seakan kehilangan nurani dan akal sehat karena terjebak menjadi orang (pendendam, pembunuh, pemerkosa, pembakar, Taufik Ismail) yang mendegradasi martabat kemanusiaan.

Tidak dapat disangkal bahwa di

tengah carut-marut politik yang dipicu oleh sebagian elit politik dan media massa yang memanfaatkan momentum ketidak stabilan dan konflik yang berkepanjangan, suatu terobosan lobi dari wakil-wakil rakyat kita merupakan kebutuhan yang mendesak.

Lobi merupakan suatu instrumen Komunikasi Politik yang ditujukan bagi upaya untuk memperlancar dan memuluskan gagasan/idea politik menjadi realita. Kemampuan lobi dari wakil-wakil rakyat di Parlemen bertujuan untuk meyakinkan mitra kerja dan kadangkala lawan politik agar mereka mau berunding, memahami posisi sesama dan mencapai kompromi atau konsensus. Oleh karena itu lobi bagi legislator sesuatu keterampilan yang tidak boleh kalah kiprahnya dengan para eksekutif manapun juga.

Lobi legislator ditantang untuk mampu menyelesaikan konflik yang merebak dari Sabang sampai Merauke. Wakil rakyat mengemban amanat untuk mampu meyakinkan pemerintah agar jangan sampai keliru dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak.

Kini Indonesia memerlukan kepemimpinan yang tangguh dan solid untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan dan sangat meletihkan. Kalau demikian halnya, kemampuan lobi termasuk kepiawaian dalam argumentasi dan bernegosiasi. Para Parlementaria sesungguhnya adalah mereka yang memiliki kemampuan dan otoritas meyakinkan mitra kerja dan lawan politik dengan mengoptimalkan keahlian sebagai negosiator, di samping keahlian-keahlian lainnya.

Adapun kriteria negosiator sebagai instrumen lobi adalah antara lain sebagai berikut : memiliki pengetahuan tentang topik/isu; mempunyai keterampilan analitis

mengenai masalah sosial, ekonomi, politik, dan yang relevan; wawasan komunikasi; kemampuan persuasi; daya tahan (*Ausdauer*); mental dan fisik tangguh; kestabilan emosi; perilaku simpatik; memperjelas legitimasi; dan siap untuk kalah dan menang. Sedangkan dalam implementasi perlu diperhatikan antara lain pastikan ruang/waktu yang tepat, menciptakan kondisi kondusif, menganalisis kubu lawan, mengenal perbedaan posisi awal, mengupayakan menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan/*consensus*.

3. Wawasan Komunikasi Politik

Komunikasi politik sesungguhnya secara pendekatan keilmuan merupakan salah satu bentuk spesialisasi Ilmu Komunikasi. Dalam ranah ini tertua ilmunya adalah *Rhetorica* atau *Public Speaking*. Dalam tahapan berikutnya terdapat Jurnalistik, sebagai bagian dari media massa yang meliputi Radio, Televisi, Film dan Audio Visual lainnya dan bahkan kini teknologi *Cyber Space* seperti internet dikategorikan pula sebagai cakupan media massa. Di samping komunikasi politik ada pula Komunikasi Sosial, Komunikasi Antar Budaya, Komunikasi Dakwah dan Komunikasi Interpersonal serta spesialisasi komunikasi lainnya seperti *Advertising* dan *Broadcasting* yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi (IT).

Unsur-unsur komunikasi agar terciptanya suatu proses komunikasi supaya tercapainya tujuan atau efek komunikasi terdiri dari sumber (*source*), pesan (*message*), media (*channel*) dan penerima (*receiver*). Prof. Dr. David K. Berlo (1960) merumuskan formula komunikasi secara sederhana tapi mengena. Formulanya dikenal dengan singkatan SCMR, yaitu *Source*

(pengirim), *Channel* (saluran – media), *Message* (pesan) dan *Receiver* (penerima).

Para ahli yang lain mengingatkan seperti Charles-Osgood, dan Melvin De Fleur jangan lupa pada umpan baliknya (*feedback*). Umpan balik ini atau efek yang ditimbulkan patut secara cermat diperhitungkan oleh komunikator terutama yang berpredikat Elit Politik termasuk Anggota Parlemen di dalamnya.

Upaya elit untuk mempengaruhi masyarakat agar gagasan politik yang memiliki substansi ideologi, orientasi politik dan pemikiran yang diarahkan untuk mempengaruhi masyarakat pada suatu capaian dan prestasi tertentu dengan segala konsekuensi yang patut diperhitungkan, dapatlah disebut sebagai ruang lingkup atau definisi komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari elit politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan dan tanggung gugat (*akuntabilitas*).

Prof. Dr. David Easton yang menggeluti masalah sistem politik mencermati komunikasi politik sebagai sejumlah atau seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas *social behavior* dengan caranya masing-masing mempengaruhi bahkan hendak menguasai masyarakat dengan gagasan yang mereka miliki. Sehingga aktivitas komunikasi politik mampu mengikat semua komponen bangsa dengan sanksi dan kompensasi yang disepakati bersama.

Definisi Komunikasi Politik yang sangat terkait dengan sistem politik di suatu negara dirumuskan oleh Prof. Meadow (1998), yaitu : "*political*

communication refers to any exchange of symbols or message that to a significant extent have been shaped by or messages for the political systems".

Komunikasi Politik menemukan formatnya pada suatu tahapan sistem politik yang relatif sudah mapan. Elit politik dalam menyampaikan gagasan politiknya agar "dituruti" oleh masyarakat tentu harus memperhatikan kondisi-kondisi obyektif, sistem nilai dan dinamika masyarakat dengan cara-cara persuasif, kooperatif dan bermoral. Komunikasi Politik diibaratkan Prof. Alfian (1991) sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, melainkan apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup.

Komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, dan juga mempersambungkan masa kini dengan masa lalu. Kalau demikian halnya maka aktivitas komunikasi politik bersifat politik, memiliki konsekuensi politik dan bahkan kalau elit politik cakap mengemas dan mengkomunikasikannya secara pas dan proporsional maka ia akan mampu mempengaruhi perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konfigurasi kompleks dari sejumlah kaidah acuan hidup yang menuntun manusia dapat hidup secara bermartabat, bermoral dan berperilaku terpuji dapat dikategorikan sebagai etika manusia beradab.

Menata komunikasi politik haruslah dimulai dengan memperhatikan pokok-pokok Etika dalam Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001) yaitu elit politik kita harus "*mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan*

serta martabat diri sebagai warga bangsa."

Menarik mencermati Putusan MPR RI No. 8/MPR/2004 tentang Kode Etik yang masih selaras dengan kondisi politik dewasa ini yang belum optimal dilaksanakan. Setiap anggota Majelis wajib mematuhi etika antara lain butir b "*bersikap kesatria dalam segala ucapan dan tindakan*" dan butir 10 "*memberikan informasi yang benar tentang hal-hal yang patut diketahui oleh masyarakat*" serta butir 19 "*memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi rakyat."*

Suatu *ideale Vorstellung* gambaran yang didambakan sebagai penuntun untuk mencapai cita-cita kehidupan atau hidup dalam keber"*ada*"an bersama (Zusammensein, Heidegger) hidup berdampingan untuk mencapai masa depan dengan cara-cara yang dirancang secara tertib, realistik dan memiliki prospektif, dapat disebut *vision*.

Etika dan visi bergandengan dengan dan bersanding untuk menunjukkan kemampuan manusia agar dapat hidup lebih berkelayakan, beradab sebagai refleksi eksistensi manusia yang merupakan makhluk sosial untuk mengabdikan kepada Sang Pencipta dan berperilaku terpuji dengan sesama. Sumber inspirasi bagi terciptanya etika dan visi dapat dirujuk dari ajaran / kaidah agama, nilai universal, nilai-nilai ke Indonesiaan (nasional atau konstitusi, adat istiadat, *local genius* kedaerahan) dan untuk terlaksananya hal tersebut diperlukan faktor keteladanan, acuan imperatif dengan sanksi hukum dan pengawasan masyarakat.

4. Pengertian dan Prinsip Dasar Komunikasi

Setiap insan diberi kemampuan berkomunikasi menurut kodrat dan caranya masing-masing. Seseorang yang menyampaikan pikiran dan perasaannya disebut komunikator (communicator) yang mendengar dan meresponsnya disebut komunikan (communicant/audience) atau dapat dirinci sebagai pendengar, penonton/pemirsa atau khalayak.

Isi komunikasi disebut pesan (messages) sedangkan media yang digunakan merupakan instrumen penyaluran (channel). Hasil yang diharapkan agar tercapainya tujuan berkomunikasi disebut efek (effect) dengan selalu memperhitungkan gangguan (noise) yang mungkin muncul. Sehingga proses komunikasi ini menciptakan "siapa", "mengatakan apa", dengan "saluran apa", "kepada siapa", dan "dengan akibat" dan "hasil yang bagaimana."

Ditilik dari komunikasi politik, aktornya meliputi berbagai pejabat politik yang berkedudukan di lembaga eksekutif, legislatif dan pejabat yudikatif. Banyak definisi komunikasi dari para ahli. Sebagai pakar komunikasi yang juga ahli politik Prof. Dr. Harold Lasswell merumuskan suatu model (1948) 5W yaitu *Who* (Siapa), *Say What* (mengatakan apa), *In Which Channel* (di media mana), *To Whom* (kepada siapa) dan *With What Effect?* (dengan efek/hasil apa?). Model ini dikenal sebagai Formula Lasswell.

Model 5W dalam jurnalistik berkembang menjadi 5W 1H yaitu tambahan *How ?* (bagaimana) yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Gail Boardman. Kalau ditelaah lebih mendalam, *Who* berarti komunikator (baca: bisa pejabat publik, anggota parlemen, menteri, gubernur, camat, dan

lain-lain). Ia menjadi acuan informasi. *Say What* bermakna pesan atau isi informasi (baca: dapat berupa pesan dan pernyataan politik, komunike, protes, dan lain-lain). *In Which Channel* yaitu berupa saluran komunikasi atau media yang dipergunakan (baca: media cetak, media elektronik seperti radio, tv, telepon, dan lain-lain). *To Whom* berarti kepada siapa pesan itu ditujukan atau siapa penerima isi pesan itu ditujukan atau siapa penerima isi pesan komunikasi (baca: konstituen, masyarakat, pemangku kepentingan, dan lain-lain). Sedangkan *With What Effect?* berarti manfaat apa atau dampak apa saja yang ditimbulkan (baca: apakah sipenerima pesan/khalayak sudah paham, mengerti, setuju atau sebaliknya atau ia merasa tenang atau terhibur dan mau memahami).

Tahapan terjadinya komunikasi ini disebut pula dengan istilah proses komunikasi. Dalam model ini diperlukan suatu perencanaan yang baik. Dengan kata lain komunikator yang cerdas ia mampu menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik dengan mempertimbangkan segala variabel sehingga mencapai sasaran dan tujuan berkomunikasi yang diharapkan. Artinya kita mampu memberi pemahaman dan secara tidak langsung mampu kita pengaruh dengan cara-cara persuasi.

Secara singkat Prof. Dr. Carl I. Hovland menyederhanakan definisi komunikasi sebagai suatu proses untuk mengubah perilaku orang lain (communication is process to modify the behavior of other individualism). Intinya proses komunikasi adalah kemampuan komunikator mentransformasikan simbol-simbol berupa lambang, sinyal, kata-kata, pernyataan yang perlu dipahami oleh komunikan sehingga ia menuruti apa keinginan komunikan.

Adalah fungsi komunikasi yang memiliki visi masa depan ketika ada tuntutan untuk melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi penerus. Fungsi komunikasi menjembatani dan mempercepat proses pemindahan nilai-nilai dan norma-norma dari komunikator kepada khalayak dengan cara-cara yang seksama. Dari sisi lain dapat pula dinyatakan bahwa fungsi komunikasi adalah memberi informasi atau mengkomunikasikan (to inform), melakukan upaya pendidikan atau mendidik (to educate), melaksanakan upaya untuk menyenangkan publik atau menghibur (to entertain) dan fungsi yang teramat signifikan adalah secara sistematis mencoba terus mempengaruhi (to influence) mitra bincang atau khalayak.

Dengan demikian kepada setiap dewan dituntut dan diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang andal (communication skill) dalam segala strata. Kalau kita kembali kepada analisis Harold Lasswell dalam "*the structure and function of communication in society*" (1948) maka terdapat tiga fungsi atau tujuan komunikasi. Yaitu, fungsi melakukan pengawasan (surveillance), fungsi menghubungkan berbagai komponen masyarakat (correlating of the component of society in making a response to the environment) dan melakukan upaya pelimpahan urusan sosial ("transmission of the social inheritance).

Dalam konteks ini menjadi relevan tugas-tugas mulia dari para ahli penyuluh dalam kaitan komunikasi Pembangunan. Bagaimana petugas di lapangan mampu menyerap aspirasi masyarakat mencoba melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak sehingga keinginan masyarakat bukan saja tersalur tetapi tercapai apa yang mereka harapkan. Masyarakat menuntut

adanya kesinambungan dari nilai-nilai atau hasil yang kini dimiliki untuk kepentingan masa depan penerusnya. Masyarakat perlu diajak untuk berpikir, merasakan dan menyadari hak dan kewajibannya. Para penyuluh komunikasi pembangunan menjadi motor dan mediator memperjuangkan hasrat dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berkesinambungan.

Pengertian komunikasi menurut pakar senior komunikasi Prof. Dr. Wilbur Schramm adalah berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti umum (common) atau bersama. Berkomunikasi berarti menciptakan kebersamaan (commonnes) dengan berbagi informasi. Jadi, hakikat komunikasi sebenarnya adalah upaya memberi dan menerima pesan komunikasi untuk menciptakan saling pengertian.

Menurut pendapat Prof. Carl I. Hovland sesungguhnya komunikasi adalah suatu proses sistematis untuk merubah perilaku orang lain (communication is process to modify the behaviour of other individualism). Oleh karena itu, tolok ukur modernitas utamanya bagi penggiat Komunikasi Pembangunan adalah ia harus memiliki visi intelektual (intellectual vision), jaringan informasi yang luas atau silaturahmi (information networking) dan mempunyai kapasitas menjangkau masyarakat (access to grassroot). Dalam konteks keindonesiaan bagaimana dengan komunikasi pembangunan masyarakat dapat hidup di alam demokrasi secara bermartabat, sejahtera dan berkeadilan. Semoga !

Daftar Pustaka

- Aly B. 1984. *Geschichte und Gegendwart der Kommunikationssysteme in Indonesien*, Peter Lang,

- Frankfurt am Mainz, Zurich,
New York.
- Ardial. 2009. *Komunikasi Politik*.
Jakarta: PT Indeks.
- Baran S. 2006. *Introduction to Mass
Communication*. Boston:
McGraw-Hill.
- Berger/Chaffe. 1987. *Handbook of
Communication Science*.
Beverly Hills, California: Sage.
- Bryant J, Thompson S. 2002.
Fundamental of Media Effect.
New York: McGraw-Hill.
- Cutlip SM *et al.* 2005. *Effective Public
Relations*. Jakarta: Gramedia.
- DeFleur D. 1991. *Understanding Mass
Communication*. Houghton,
Mifflin.
- McQuaill D, Windahl S. 1996.
*Communication Models for the
study of mass communications*.
New York: Longman.
- Nimmo D. 2000. *Komunikasi Politik:
Khalayak dan Efek*. Bandung:
Rosdakarya.
- Rakhmat D. 2007. *Psikologi
Komunikasi*. Bandung:
Rosdakarya.
- Winarso HP. 2005. *Sosiologi
Komunikasi Massa*. Jakarta:
Prestasi Pustaka.